

## Analisis Permasalahan dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Sumatera Utara

Aura Meriska<sup>1\*</sup>, Endang Aristianti Gultom<sup>2</sup>, Rosenta L Sirungkir<sup>3</sup>,  
Wike Afsari Sinaga<sup>4</sup>, Cindy Jelita Sari<sup>5</sup>, Inge Irawati<sup>6</sup>, Rivandi Anju Gurning<sup>7</sup>,  
Lili Tansliova<sup>8</sup>

<sup>1-8</sup>Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: [auraura860@gmail.com](mailto:auraura860@gmail.com)<sup>1</sup>, [endanguna03@gmail.com](mailto:endanguna03@gmail.com)<sup>2</sup>, [rosentalastarida2004@gmail.com](mailto:rosentalastarida2004@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[wikeafsarisinaga@gmail.com](mailto:wikeafsarisinaga@gmail.com)<sup>4</sup>, [cindyjelita44@gmail.com](mailto:cindyjelita44@gmail.com)<sup>5</sup>, [ingeirawati12@gmail.com](mailto:ingeirawati12@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[anjugurningrivandi@gmail.com](mailto:anjugurningrivandi@gmail.com)<sup>7</sup>, [lilitans@unimed.ac.id](mailto:lilitans@unimed.ac.id)<sup>8</sup>

Korespondensi penulis: [auraura860@gmail.com](mailto:auraura860@gmail.com) \*

**Abstract.** *The implementation of inclusive education in Indonesia aims to provide educational facilities and services for children with special needs (ABK). Inclusive education has been implemented in various schools, especially in big cities, but still faces various challenges in its implementation. This study aims to describe the problems faced by schools that provide inclusive education in North Sumatra and their resolution efforts. The objects in this study include public schools and special schools that integrate inclusive education. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The data obtained are explained through the process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Various problems arise, ranging from the lack of number and competence of special guidance teachers (GPK), difficulties for students in following lessons, lack of school readiness to run inclusive programs, to limited facilities and infrastructure that do not support the needs of children with special needs (ABK). In addition, low cooperation between schools, education offices, and parents is also an obstacle to the implementation of effective inclusive education.*

**Keywords:** *Children with Special Needs, Education, Inclusion.*

**Abstrak.** Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia bertujuan untuk menyediakan fasilitas dan layanan pendidikan bagi anak dengan kebutuhan khusus (ABK). Pendidikan inklusi telah diterapkan di berbagai sekolah, terutama di kota-kota besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan masalah yang dihadapi oleh sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi di Sumatera Utara serta upaya penyelesaiannya. Objek dalam studi ini mencakup sekolah umum dan sekolah khusus yang mengintegrasikan pendidikan inklusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Beragam masalah yang muncul, mulai dari kekurangan jumlah dan kompetensi guru pembimbing khusus (GPK), kesulitan peserta didik dalam mengikuti pelajaran, kurangnya kesiapan sekolah untuk menjalankan program inklusi, hingga keterbatasan sarana dan prasarana yang belum mendukung kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK). Selain itu, rendahnya kerjasama antara sekolah, dinas pendidikan, dan orang tua juga menjadi rintangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yang efektif.

**Kata kunci:** Anak Berkebutuhan Khusus, Pendidikan, Inklusi.

### 1. LATAR BELAKANG

Pendidikan inklusi merupakan pendekatan dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak, baik yang normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus, dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dan setara. Dengan kata lain, pendidikan inklusi tidak membedakan anak-anak berdasarkan kondisi fisik atau mental, tetapi memberikan peluang yang setara untuk belajar di lingkungan yang sama.

Tujuan utama dari pendidikan inklusi adalah menciptakan lingkungan belajar yang lebih beragam dan setara. Beragam dalam konteks ini mengacu pada pengumpulan anak-anak dengan latar belakang dan kemampuan yang bervariasi dalam satu kelas atau sekolah yang sama. Contohnya, ada anak-anak dengan keterbatasan fisik, kesulitan belajar, atau masalah mental tertentu, tetapi mereka tetap belajar bersama anak-anak tanpa kondisi khusus tersebut. Hal ini menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Sementara itu, "merata" di sini merujuk pada keadilan dan kesamaan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa adanya diskriminasi.

Setiap anak dapat tumbuh sesuai dengan potensi dan kemampuannya masing-masing. Dalam pendidikan inklusi, tidak terdapat satu standar yang diterapkan secara seragam kepada semua siswa. Sebaliknya, perhatian utamanya adalah pada pengembangan kemampuan individu. Anak-anak berkeperluan khusus diberikan bimbingan yang sesuai dengan keadaan mereka agar dapat meraih pencapaian yang maksimal, meskipun metode atau pendekatan belajarnya mungkin berbeda dari siswa lainnya.

Konsep pendidikan inklusi ini memiliki peranan krusial dalam memperbaiki aksesibilitas pendidikan. Dengan demikian, lebih banyak anak dari berbagai latar belakang, baik yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental, dapat memperoleh pendidikan yang diperlukan tanpa kendala. Ini juga berperan dalam mewujudkan keadilan sosial karena dengan pendidikan yang merata, setiap anak, tanpa pengecualian, memiliki peluang untuk berhasil, tanpa memandang latar belakang mereka. Keberagaman ini juga berkontribusi pada pengurangan stigma terhadap anak-anak berkebutuhan khusus dan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih inklusif.

Pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia sudah diatur dalam sejumlah kebijakan nasional yang bertujuan menyediakan dasar hukum dan panduan dalam penerapannya. Salah satu landasan hukum yang mengatur pendidikan inklusi adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Dalam peraturan ini, dinyatakan bahwa setiap anak, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, berhak menerima pendidikan yang sesuai. Di samping itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 mengenai Pendidikan Inklusif juga diterbitkan untuk memberikan panduan yang lebih rinci tentang pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah-sekolah di Indonesia. Aturan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap anak, baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun yang tidak, dapat bersekolah bersama dalam satu lingkungan yang bersifat inklusif. Selain Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan inklusif juga diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang

Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, yang menyatakan bahwa: Pendidikan inklusif adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua peserta didik dengan kelainan serta memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan bersama-sama dengan peserta didik lainnya. Dalam pasal 2 peraturan tersebut dinyatakan bahwa Pendidikan inklusif bertujuan: (1) memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang mengalami kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa agar bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka; (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keragaman, serta bersifat non-diskriminatif untuk semua peserta didik. Keberhasilan program inklusi tergantung pada adanya guru yang bisa mengakomodasi dan memberikan dukungan bagi kebutuhan semua siswa dalam kelas, dengan tidak terlalu banyak paksaan dan tetap menghormati hak siswa (Bélanger dan Maertens, 2004).

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Konsep Pendidikan Inklusi**

Pendidikan inklusi merupakan suatu metode dalam sistem pendidikan yang bertujuan memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, untuk belajar dalam lingkungan pendidikan yang sama dengan siswa lainnya (UNESCO, 1994). Dasar utama dari pendidikan inklusif adalah ketersediaan, keterlibatan, dan pencapaian yang setara dalam proses belajar.

Pokok dari pendidikan inklusi adalah kemampuan untuk diakses, keterlibatan, dan pencapaian yang setara dalam proses belajar. Aksesibilitas mengindikasikan bahwa setiap peserta didik harus memiliki peluang untuk mengakses pendidikan tanpa adanya rintangan fisik, sosial, atau akademik. Partisipasi merujuk pada keaktifan semua siswa yang terlibat dalam proses belajar, tanpa diskriminasi. Pencapaian setara menekankan bahwa semua siswa, baik yang memiliki maupun tidak memiliki kebutuhan khusus, menerima dukungan yang diperlukan untuk memaksimalkan potensi akademis mereka.

Menurut Sapon-Shevin (2007), pendidikan inklusi bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung berbagai keanekaragaman dan memenuhi kebutuhan semua peserta didik tanpa adanya diskriminasi. Di sisi lain, Ainscow (2005) menegaskan bahwa pendidikan inklusi tidak hanya ditujukan untuk siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga untuk mengubah sistem pendidikan agar lebih responsif terhadap berbagai kebutuhan siswa.

## **Kebijakan dan Implementasi Pendidikan Inklusi di Indonesia**

Di Indonesia, regulasi tentang pendidikan inklusi telah ditetapkan dengan tujuan memastikan bahwa semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, memperoleh hak yang setara dalam mengakses pendidikan.

Salah satu peraturan penting ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang baik tanpa adanya diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, harus mendapatkan peluang yang setara untuk belajar di sekolah formal maupun nonformal dengan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Di samping itu, ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 mengenai Pendidikan Inklusif untuk Peserta Didik yang Mempunyai Kelainan serta Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Aturan ini memberikan arahan kepada sekolah untuk melaksanakan pendidikan inklusi. Beberapa hal krusial dalam peraturan ini meliputi tanggung jawab sekolah reguler untuk menerima siswa berkebutuhan khusus, termasuk mereka yang mengalami cacat fisik, intelektual, sosial, atau emosional. Selain itu, sekolah juga harus menyediakan fasilitas dan layanan pendidikan yang memenuhi kebutuhan semua siswa, termasuk infrastruktur yang mendukung anak dengan kebutuhan khusus. Pelatihan bagi guru dan staf pendidikan menjadi aspek penting agar mereka memiliki kualifikasi dalam mengajar di ruang kelas inklusif. Selain itu, diperlukan penyesuaian kurikulum dan metode pengajaran guna memenuhi keberagaman siswa dalam satu konteks pembelajaran, sehingga setiap siswa dapat memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.

### **3. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif. Menurut Arikunto (2005: 234), penelitian deskriptif hanya bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan gejala, dan bukan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini dipilih oleh peneliti karena mereka bermaksud untuk mendeskripsikan, menguraikan, mengidentifikasi, dan menggambarkan masalah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Sumatera Utara.

Objek dalam kajian ini adalah institusi pendidikan di Sumatera Utara yang sebagian informasi diambil berdasarkan pengamatan terhadap sekolah serta data umum yang tersedia mengenai sekolah inklusi di Sumatera Utara.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Oleh sebab itu, alat yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari pedoman wawancara, pedoman dokumentasi, dan panduan observasi. Pedoman wawancara ditujukan bagi tenaga pendidik di sekolah yang melaksanakan pendidikan Inklusi. Pedoman Observasi dipakai untuk menilai keadaan sarana prasarana serta proses pembelajaran. Panduan dokumentasi bertujuan untuk memeriksa arsip institusi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kualitatif, oleh karena itu teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan melakukan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Reduksi data yang dilakukan adalah memilih data-data penelitian dari hasil observasi dan wawancara berdasarkan setiap sumber, kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam kategori sesuai dengan fokus permasalahan, yaitu tantangan dan solusi sekolah dalam mengatasi pengelolaan pendidikan inklusif di Sumatera Utara. Penyajian data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu isu dan pemecahan untuk menangani masalah dalam pengelolaan pendidikan inklusif.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Permasalahan dalam Pelaksanaan Pembelajaran Inklusi**

Dalam pengelolaan pendidikan inklusif di Sumatera Utara ditemukan beberapa masalah terkait dengan tenaga kependidikan. Permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sumatera Utara dapat dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek berikut.

##### **1. Pendidik (guru)**

Pendidik mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus. Pendidik dalam lingkungan inklusif meliputi kepala sekolah, guru, guru pembelajaran khusus, dan TU. Tenaga kependidikan yang paling besar peranannya adalah guru. Terdapat dua jenis guru dalam pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar, yaitu kepala sekolah dan guru pamong khusus. Guru harus bekerja sama dalam menyelenggarakan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan inklusif.

Beberapa permasalahan terkait tenaga kependidikan teridentifikasi dalam pengelolaan pendidikan inklusif di Sumatera Utara. Masalah-masalah ini meliputi, dibandingkan dengan jumlah ABK di sekolah inklusif, guru pembimbing yang berdedikasi masih kurang. Kurangnya kemampuan supervisi khusus guru dalam menangani ABK, antara lain kesulitan dalam

kegiatan belajar mengajar (KBM), kurangnya pemahaman guru tentang ABK, dan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan guru dengan kualifikasi GPK;

## 2. Peserta didik

Permasalahan yang berkaitan dengan siswa meliputi: ABK dengan permasalahan yang berbeda dan memerlukan penanganan yang berbeda serta berada dalam satu kelas akan menjadi kendala dan kesulitan tersendiri bagi GPK dalam memberikan pelayanan; ABK mengalami kesulitan dalam mengikuti materi pelajaran, hal ini disebabkan oleh kemampuan akademik ABK yang jauh tertinggal dibandingkan dengan anak reguler sehingga memerlukan banyak penyesuaian; Sikap ABK yang belum mampu mengikuti aturan sehingga dapat mengganggu proses KBM, dan; Permasalahan siswa reguler terhadap ABK terkait dengan kurangnya rasa empati dan kepedulian terhadap kekurangan yang dimiliki oleh anak ABK.

## 3. Manajemen sekolah

Manajemen sekolah yang baik akan dapat memberikan pengaruh positif kepada sekolah dan diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan dengan cara yang efektif dan efisien.

Permasalahan dalam manajemen sekolah antara lain: Perencanaan pengelolaan pendidikan inklusi yang belum sepenuhnya melibatkan guru dan personel lainnya; Pengorganisasian dalam pembagian tugas yang belum dijalankan secara maksimal oleh guru yang menerima tugas dan pengawasan kegiatan atau program yang belum terjadi secara menyeluruh; Belum siapnya sekolah dengan program sekolah inklusi baik dari segi administrasi maupun SDM, dan; Proses KBM yang belum berjalan maksimal, selama ini ABK belum mendapatkan pelayanan khusus dan program khusus dari sekolah dalam hal pengembangan potensi.

## 4. Kurikulum

Pengelolaan pendidikan inklusif di Sumatera Utara menggunakan kurikulum nasional yang dipakai oleh sekolah pada umumnya, hal ini karena guru pembimbing khusus masih kesulitan dalam pengembangan kurikulum plus yang disesuaikan dengan kemampuan anak berkebutuhan khusus, sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif masih belum efektif.

## 5. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran di sekolah-sekolah Sumatera Utara dalam setting inklusif yaitu dengan menggabungkan peserta didik normal dengan anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas secara bersamaan. Dalam proses pembelajarannya, karena belum ada guru pembimbing khusus, guru kelas menangani peserta didik secara keseluruhan. Oleh karena itu, guru mengalami kesulitan dalam menangani peserta didik. Dalam proses pembelajaran,

pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus masih belum maksimal, pembelajaran masih dicampur dengan anak normal lainnya, hal tersebut menyebabkan keributan antara anak berkebutuhan khusus dan anak normal.

#### 6. Sarana prasarana

Di sekolah-sekolah di Sumatera Utara yang menyelenggarakan pendidikan inklusi merupakan sekolah inklusif yang di dalamnya terdapat beragam peserta didik dengan masing-masing kebutuhan yang berbeda sehingga dalam pengelolaannya, sekolah harus menyiapkan sarana prasarana dan aksesibilitas yang mendukung untuk tercapainya tujuan sekolah. Beberapa masalah sarana prasarana yang ada biasanya meliputi, belum tersedianya ruang khusus bagi ABK, tidak sesuainya sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah dengan kebutuhan ABK, misalnya media pembelajaran dan alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan alat pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus.

#### 7. Kerjasama

Komponen kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama yang terjalin antara sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dengan dinas (pemerintah) dan orang tua peserta didik. Permasalahan kerjasama dengan dinas terkait yaitu belum ada penugasan guru SLB dari dinas untuk dijadikan GPK di sekolah penyelenggara inklusif, tetapi hanya penunjukan guru dari sekolah asal untuk menjadi GPK meskipun dengan lulusan yang belum sesuai. Permasalahan dengan orang tua adalah rendahnya kepedulian orang tua terhadap penanganan anak berkebutuhan khusus, bahkan orang tua terkadang tidak mau tahu terkait dengan program-program khusus yang harus dilakukan sebagai upaya pemberian layanan kepada anak ABK. Baik itu kegiatan penilaian yang harus dilakukan secara berkala maupun berbagai bentuk evaluasi berdasarkan karakteristik awak kapal, beban administrasi GPK semakin berat.

### **Solusi dalam Permasalahan Pelaksanaan Pembelajaran Inklusi**

Dalam permasalahan pelaksanaan tentu saja terdapat solusi untuk mengatasi hal tersebut. Solusi yang dapat diterapkan untuk meminimalkan permasalahan adalah sebagai berikut.

#### 1. Tenaga Pendidik (Guru)

Solusi untuk kurangnya jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK): Untuk mengatasi kurangnya jumlah GPK, pemerintah daerah seharusnya menyediakan pelatihan dan pendidikan khusus bagi guru yang memenuhi syarat untuk menjadi GPK. Sekolah juga dapat melakukan perekrutan tenaga pendidik yang kompeten dan melibatkan GPK dari luar daerah jika dirasa perlu. Pembiayaan untuk penugasan GPK ini dapat diajukan melalui anggaran pendidikan daerah atau program-program pemerintah yang mendukung pendidikan inklusif.

Solusi untuk kurangnya kompetensi guru pembimbing khusus: Pelatihan dan sertifikasi untuk GPK perlu diadakan secara teratur agar mereka lebih memahami kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK). Di samping itu, peningkatan pemahaman mengenai ABK dalam konteks teori dan praktik harus dilakukan, dengan mendatangkan narasumber ahli dalam pendidikan inklusif. Hal ini juga mencakup peningkatan pengetahuan guru tentang metode pengajaran yang sesuai dengan berbagai jenis kebutuhan ABK, serta pelatihan dalam manajemen kelas inklusif yang efektif.

Solusi untuk beban administrasi yang berat: Penyederhanaan dan pengoptimalan sistem administrasi dapat membantu GPK. Sebagai contoh, penggunaan teknologi untuk pengelolaan data ABK, sehingga administrasi menjadi lebih efisien. Dinas pendidikan perlu menyediakan alat bantu yang mempermudah pelaporan dan asesmen secara digital, sehingga beban administrasi dapat berkurang tanpa mengurangi kualitas pengawasan.

## 2. Peserta Didik (ABK)

Solusi untuk perbedaan kebutuhan penanganan ABK dalam satu kelas dapat dilakukan dengan cara Penyusunan rencana pembelajaran yang lebih fleksibel dan terpersonalisasi untuk setiap ABK sangat dibutuhkan. GPK dan guru kelas harus melakukan asesmen kebutuhan individual (Individualized Education Plan / IEP) bagi setiap ABK agar strategi pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Hal ini juga mencakup pemberian pendampingan yang lebih intensif kepada ABK dengan kesulitan tertentu, seperti terapi atau bimbingan tambahan.

Sedangkan solusi untuk kesulitan ABK dalam mengikuti materi pelajaran dapat menggunakan metode pengajaran yang lebih bervariasi dan berbasis pada kompetensi individual ABK sangat penting. Penyusunan kurikulum yang lebih fleksibel dengan adaptasi materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan ABK sangat diperlukan. Selain itu, penggunaan alat bantu pembelajaran (seperti alat visual, teknologi pendidikan, dan materi yang lebih interaktif) bisa membantu ABK mengikuti pelajaran dengan lebih lancar.

Solusi untuk sikap ABK yang belum bisa mengikuti aturan yaitu diperlukan pendekatan yang lebih sabar dan penuh empati dalam proses pembelajaran untuk ABK. Pemberian penguatan positif, penanaman disiplin secara bertahap, serta penerapan program pengembangan sosial-emosional dapat membantu ABK menyesuaikan diri dengan aturan yang ada di kelas. Selain itu, melibatkan psikolog sekolah atau konselor dalam membantu ABK beradaptasi juga sangat penting.

Solusi untuk kurangnya empati dari siswa reguler terhadap ABK diperlukan program pengenalan dan pemahaman tentang ABK kepada siswa reguler yang perlu dilakukan secara berkala. Ini bisa melalui seminar, workshop, atau proyek bersama yang mengajarkan nilai empati dan inklusi. Selain itu, melibatkan siswa reguler dalam kegiatan sosial yang berkaitan dengan ABK akan membantu mereka memahami perbedaan dan pentingnya kerjasama dalam pembelajaran inklusif.

### 3. Manajemen Sekolah

Solusi untuk perencanaan pengelolaan pendidikan inklusi yang belum melibatkan guru dan personel lain: Sekolah membutuhkan perencanaan kolaboratif yang mencakup semua pihak terkait, seperti guru kelas, GPK, kepala sekolah, dan orang tua. Penyusunan program kerja tahunan yang inklusif harus disesuaikan dengan kebutuhan ABK serta memberikan kesempatan bagi partisipasi aktif dari tenaga pendidik lainnya. Pertemuan rutin antara guru dan pihak manajemen sekolah untuk mengevaluasi program pendidikan inklusif perlu dilaksanakan agar bisa diperbaiki secara berkelanjutan.

Solusi untuk pengorganisasian tugas yang belum maksimal dapat dilakukan dengan pembuatan pembagian tugas yang jelas dan terstruktur, termasuk pembagian tanggung jawab antara guru kelas dan GPK. Ini juga mencakup pengawasan terhadap perkembangan ABK dan evaluasi berkala terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Supervisi dan pengawasan dari kepala sekolah terhadap program pendidikan inklusif juga perlu ditingkatkan.

Solusi untuk kesiapan sekolah dalam program sekolah inklusi adalah sekolah perlu lebih siap dalam menyediakan sumber daya manusia yang memadai serta infrastruktur yang mendukung program pendidikan inklusif. Pemenuhan kebutuhan administratif dan peningkatan kualitas SDM harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pendidikan inklusif. Pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam memberikan dukungan terhadap kesiapan sekolah.

Solusi untuk proses KBM yang belum maksimal dapat dilakukan dengan merancang program yang khusus untuk ABK yang lebih spesifik dan menargetkan pengembangan potensi mereka. Sebelumnya, ABK sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam hal pengembangan keterampilan dan keahlian. Sekolah perlu menyusun program pendidikan yang lebih terarah untuk mendukung pengembangan kompetensi ABK secara optimal.

### 4. Kurikulum

Solusi untuk kesulitan dalam pengembangan kurikulum untuk ABK yaitu perlu mengembangkan kurikulum yang inklusif, sekolah harus mengadaptasi kurikulum nasional agar lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ABK.

Penggunaan kurikulum berbasis kompetensi yang bisa dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan ABK akan sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pelatihan bagi GPK dalam pengembangan kurikulum yang lebih inklusif juga sangat diperlukan.

#### 5. Proses Pembelajaran

Solusi untuk penggabungan ABK dengan siswa reguler dalam satu kelas dapat dilakukan dengan pengaturan kelas yang lebih fleksibel dan terstruktur dengan baik. Misalnya, kelas bisa dibagi menjadi kelompok kecil dengan pengajaran lebih intensif bagi ABK, sedangkan siswa reguler tetap mendapatkan materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jika memungkinkan, penggunaan teknologi seperti aplikasi pembelajaran juga dapat membantu mengelola proses belajar secara lebih efisien. Pembagian tugas antara guru kelas dan GPK yang jelas dapat membantu menciptakan suasana belajar yang kondusif.

#### 6. Sarana Prasarana

Solusi untuk belum tersedianya ruang khusus bagi ABK yaitu Sekolah perlu menyediakan ruang yang lebih inklusif dan ramah bagi ABK. Ruang kelas dan sarana pembelajaran lainnya harus dirancang agar dapat diakses oleh semua jenis ABK, termasuk mereka yang memiliki gangguan fisik. Pemerintah daerah perlu menyediakan anggaran untuk renovasi sekolah agar sarana dan prasarana sesuai dengan standar pendidikan inklusif.

Solusi untuk ketidakcocokan sarana prasarana dengan kebutuhan ABK Sekolah perlu memastikan bahwa media pembelajaran dan alat peraga yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan ABK. Ini mencakup alat bantu untuk anak dengan gangguan penglihatan, pendengaran, atau keterbatasan fisik lainnya. Sekolah bisa bekerja sama dengan lembaga lain untuk menyediakan peralatan yang lebih inklusif, seperti alat bantu dengar atau perangkat lunak pendidikan.

#### 7. Kerjasama

Alternatif untuk kerjasama dengan dinas terkait: Pemerintah daerah harus memberikan dukungan kepada sekolah inklusif dengan menugaskan guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai GPK dari SLB. Pemerintah perlu memastikan bahwa penempatan guru dilakukan dengan tepat agar pelaksanaan pendidikan inklusif dapat berlangsung dengan baik. Pengembangan kebijakan yang memfasilitasi kerjasama antara sekolah dan dinas pendidikan juga sangat krusial untuk memperlancar pelaksanaan program inklusif.

Alternatif untuk kerjasama dengan orang tua: Memperkuat peran orang tua dalam pendidikan ABK sangat diperlukan. Sekolah perlu melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan inklusif kepada orang tua. Selain itu, sekolah dapat membentuk

kelompok atau komunitas orang tua yang mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus, sehingga komunikasi dan kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua dapat terjalin dengan lebih baik.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Permasalahan dalam implementasi pendidikan inklusi di Sumatera Utara dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek utama, yaitu tenaga pendidik, peserta didik, manajemen sekolah, kurikulum, proses pembelajaran, sarana prasarana, dan kerjasama. Beragam masalah yang muncul, mulai dari kekurangan jumlah dan kompetensi guru pembimbing khusus (GPK), kesulitan peserta didik dalam mengikuti pelajaran, kurangnya kesiapan sekolah untuk menjalankan program inklusi, hingga keterbatasan sarana dan prasarana yang belum mendukung kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK). Selain itu, rendahnya kerjasama antara sekolah, dinas pendidikan, dan orang tua juga menjadi rintangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yang efektif.

Solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut meliputi penyediaan pelatihan dan sertifikasi untuk GPK, penerapan kurikulum yang lebih fleksibel dan berbasis kompetensi individual ABK, serta pengoptimalan peran manajemen sekolah dalam mengelola program pendidikan inklusi. Selain itu, peningkatan empati siswa reguler terhadap ABK melalui program sosialisasi dan kegiatan bersama dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Penyediaan sarana prasarana yang ramah ABK serta peningkatan koordinasi antara sekolah, dinas pendidikan, dan orang tua juga menjadi langkah penting dalam mendukung kesuksesan pendidikan inklusi. Dengan penerapan solusi yang tepat, diharapkan pendidikan inklusi di Sumatera Utara dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Agustin, I. (2019). Permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di SDN se-Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. *ELSE (Elementary School Education Journal): Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 3(2), 17–26.
- Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: What are the levers for change? *Journal of Educational Change*, 6(2), 109–124.
- Arikunto, S. (2005). *Manajemen penelitian*. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian*. Rineka Cipta.

- Budiyanto, dkk, & TIM MCPM-AIBEO. (2009). *Modul training of trainers pendidikan inklusif*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional DIY. (2011). *Monitoring pendidikan inklusif, belum optimal*. Retrieved from <http://www.pendidikan-diy.go.id>
- Giangreco, M. F. (2013). Teacher assistant supports in inclusive schools: Research, practices and alternatives. *Australasian Journal of Special Education*, 37(2), 93–106. <https://doi.org/10.1017/jse.2013.1>
- Harian Yogya. (2013). Sekolah inklusi di Yogya belum pro anak berkebutuhan khusus. Retrieved from <http://www.harianjogya.com>
- Illahi, T. (2013). *Pendidikan inklusif: Konsep dan aplikasi*. AR Ruzz Media.
- Kustawan, D. (2012). *Manajemen pendidikan inklusif*. PT Luxima Metro Media.
- Kustawan, D., & Meimulyani, Y. (2013). *Mengenal pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus serta implementasinya*. PT Luxima Metro Media.
- Marthan, L. K. (2007). *Manajemen pendidikan inklusif*. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Ketengaan.
- Sapon-Shevin, M. (2007). *Widening the circle: The power of inclusive classrooms*. Beacon Press.
- Tarnoto, N. (2016). Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi pada tingkat SD. *Humanitas*, 13(1), 50–61.